



## **Pedoman Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada**

### **1. Latar Belakang**

"Pengabdian kepada Masyarakat" (PkM) adalah salah satu dari tiga dharma perguruan tinggi di Indonesia, yang secara visi merupakan bagian integral kerja akademik tetapi secara fakta tidak optimal pelaksanaannya. PkM sebagai dharma wajib bagi *civitas academica* UGM memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Meskipun demikian, sejauh ini pelaksanaan kegiatan PkM di berbagai tingkatan unit kerja di perguruan tinggi masih bersifat insidental, cenderung terserak dan berlangsung secara *seclusive* (atau tertutup, dalam arti hanya "diketahui" oleh pelaksana kegiatan). Akibatnya dampak atau hasil kegiatan PkM tidak teridentifikasi secara sistematis dan institusional kecuali bagi pemenuhan administrasi akademik dosen (misalnya untuk kenaikan pangkat dan pemenuhan pengisian Laporan Kinerja Dosen, LKD). Wujud hasil kegiatan PkM dalam konteks pengembangan segitima dharma pengetahuan, juga tidak begitu terpetakan. Harus diakui bahwa selama ini dharma PkM hanya ditempatkan sebagai "lampiran" dalam tiga unsur kerja akademik perguruan tinggi. Karena itu perlu ada pembenahan.

Setidak-tidaknya sejak awal tahun 2017 pemerintah mulai memberikan perhatian lebih besar untuk membenahi pelaksanaan PkM dengan tujuan agar kegiatan PkM terintegrasi dalam rencana program pengembangan akademik di Perguruan Tinggi secara terarah dan berkelanjutan. Kebutuhan untuk membenahi dan menata kembali kegiatan PkM didorong oleh beberapa hal, yaitu:

1. Adanya prinsip kegiatan berbasis *output* menuntut substansi dan pola pelaksanaan kegiatan yang lebih terprogram, terarah, tersinergikan dan terukur hasilnya.
2. Meskipun PkM merupakan salah satu keunggulan perguruan tinggi di Indonesia, tetapi selama ini relatif tidak optimal pelaksanaan dan pemanfaatannya untuk pengembangan. Bagi UGM secara khusus, PkM adalah salah satu penciri dari identitas "kerakyatan" yang secara historis memberi landasan dan misi keberadaannya.
3. Adanya kebutuhan untuk pencatatan (dan kuantifikasi) lebih sistematis semua kegiatan tri dharma Perguruan Tinggi antara lain akibat tuntutan kemajuan teknologi melalui sistem indeksing kerja akademik.

### **2. Batasan dan Prinsip-prinsip Cakupan**

Pengertian, batasan dan cakupan kegiatan PkM telah berubah menjadi semakin luas dari waktu ke waktu. Kata "*pengabdian*" di dalam istilah "Pengabdian kepada Masyarakat" telah berubah maknanya, pertama sebagai "memberi dengan semangat filantropi", lalu sebagai "menyadarkan dan memberdayakan", dan kemudian sebagai "menggerakkan dan menghubungkan" elemen-elemen potensi masyarakat. Perubahan makna "pengabdian" tersebut menggambarkan fase



atau tahapan perkembangan paradigma yang melingkupi pemahaman tentang hubungan perguruan tinggi dan perubahan masyarakat.

Dalam makna yang ketiga, yaitu yang sekarang dikembangkan, perguruan tinggi diharapkan memainkan peran ganda. *Pertama*, peran dalam menstimulasi kesadaran masyarakat tentang aneka potensi kolektif yang mereka miliki (potensi ekonomi, potensi alam, potensi budaya dan lain-lain) dan menggerakkan mereka untuk bersama-sama mengolah potensi tersebut demi kemanfaatan dan meslahatan yang optimal. *Kedua*, peran dalam menghubungkan masyarakat dengan pihak lain yang dapat mendukung masyarakat mengoptimalkan potensinya itu.

Sementara itu, kata "*masyarakat*" dalam istilah "Pengabdian kepada Masyarakat" dapat berarti

1. populasi orang dalam suatu lingkup wilayah geografis tertentu (desa, kota, sub-urban dan lain-lain)
2. komunitas, misalnya komunitas pedagang kaki lima, komunitas petani, komunitas nelayan, komunitas tukang becak, komunitas calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), komunitas editor desk internasional surat kabar dan komunitas guru-guru bidang studi tertentu.

Dalam penentuan siapa "masyarakat" dalam kegiatan PkM, secara khusus Universitas Gadjah Mada menekankan "*kategori 3T*", yaitu tertinggal, terluar dan terpinggirkan, sebagai prioritas sasaran. Kategori-kategori 3T dapat diartikan secara geografis, sosiologis, ekonomi maupun pengetahuan. Dengan batasan ini, pemilihan masyarakat sasaran program PkM harus memperhatikan relevansi antara bidang ilmu, jenis kegiatan pengabdian, dan salah satu dari ciri 3T pada kategori masyarakat yang dituju.

### 3. Bentuk-bentuk PkM dan Sifatnya

Sesuai bunyi Pasal 57 Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bentuk-bentuk kegiatan PkM secara garis besar mencakup:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
3. Peningkatan kapastias masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat

Mirip dengan butir-butir Penilaian Angka Kredit dalam sistem kenaikan pangkat dosen, Peraturan Rektor UGM No. 20 Tahun 2016 pasal 7 secara operasional menyebutkan bahwa PkM dapat berwujud kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. memberi pelatihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.



Bentuk-bentuk seperti disebutkan dalam Peraturan Rektor di atas adalah wujud operasional yang mewadahi berbagai kegiatan PkM. Dalam praktiknya sekarang, bentuk kegiatan PkM (khususnya turunan detil dari kategori bentuk b, c, d, dan e pada Peraturan Rektor No. 20/2016) dituntut agar bersifat terprogram, tematik dan lintas disiplin.

Di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya UGM, bentuk kegiatan PkM diklasifikasikan ke dalam beberapa skema yang dapat dikembangkan dengan sifat terprogram maupun insidental, tematik maupun individual, dan mono disiplin maupun lintas disiplin. Skema-skema itu meliputi:

*3.a PkM Skema Departemen*

*3.b PkM Skema Fakultas*

*3.c PkM Skema Lain-lain*

Skema Departemen bersumber dana pada RKAT Departemen, Skema Fakultas pada RKAT Fakultas, dan Skema lain-lain pada sumber-sumber lain di luar RKAT Departemen dan RKAT Fakultas, misalnya dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UGM dan dari Direktorat Pendidikan Tinggi.

***3.a PkM Skema Departemen bersifat Terprogram dan Tematik***

Kegiatan PkM pada Skema Departemen di Fakultas Ilmu Budaya dirumuskan agar bersifat terprogram dan tematik. *Terprogram* artinya kegiatan PkM dirancang dan dilaksanakan secara berlanjut, misalnya dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun yang berfokus pada satu masyarakat sasaran yang sama (yang selama ini disebut di UGM dengan istilah "desa binaan" atau "masyarakat dampingan"). Setelah jangka waktu 2 atau 3 tahun diharapkan masyarakat sasaran telah mandiri dari segi bidang yang didampingi. Dengan pola yang terprogram, kegiatan PkM yang bersifat insidental diharapkan dapat difokuskan hanya pada reaksi tanggap darurat, misalnya akibat bencana alam.

Kegiatan PkM juga diharapkan *mengangkat tema tertentu* yang terus dikembangkan selama periode pendampingan. Misalnya tema "penguatan kapasitas lokal dalam optimalisasi potensi mitigasi bencana berbasis budaya", dapat dijalankan dengan sasaran satu desa tertentu di lereng Gunung Merapi selama 2 tahun. Tim PkM dapat merinci tahap-tahap pelaksanaan kegiatan PkM dalam satu tahun yang berbeda dengan tahun berikutnya, dan seterusnya.

***3.b PkM Skema Fakultas bersifat Terprogram, Tematik dan Lintas Disiplin***

Kegiatan PkM pada Skema Fakultas di Fakultas Ilmu Budaya bersifat terprogram, tematik dan lintas disiplin. Arti terprogram dan tematik sama dengan pada Skema Departemen. Pada Skema Fakultas, kegiatan PkM diharapkan bersifat lintas disiplin dari segi pendekatan yang dipakai. Artinya suatu tema tertentu yang diangkat harus didesain untuk dapat didekati dari setidaknya-tidaknya 3 bidang ilmu yang ada di FIB, yaitu Sastra, Linguistik, Antropologi, Arkeologi, Sejarah, Pariwisata, maupun AntarBudaya. Titik tolak tema dapat saja satu bidang ilmu, tetapi pendekatannya harus lintas disiplin. Misalnya, fenomena tertentu bidang sastra didekati secara linguistik dan antropologi, dan seterusnya.



### **3.c PkM Skema Lain-lain bersifat Insidental maupun Individual**

Kegiatan PkM pada kategori Skema Lain-lain adalah kegiatan PkM yang sifatnya bisa *insidental* maupun *individual*. Seorang dosen dapat secara tiba-tiba maupun terprogram diminta untuk memberikan pelatihan kepada komunitas tertentu di luar komunitas akademik/kampusnya. Maka, kegiatan dosen tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori PkM yang individual sifatnya. Jika permintaan serupa itu hanya sesekali atau tiba-tiba datang, maka aktivitas PkM tersebut bersifat insidental. Dalam hal kegiatan PkM bersifat individual dan/atau insidental, maka topik dan cakupan sasaran kegiatan PkM dapat sangat luas. Meskipun demikian, kegiatan PkM tersebut harus tetap memenuhi prinsip-prinsip cakupan maupun bentuk kegiatan PkM yang telah diuraikan.

## **4. Penetapan Hasil dan Luaran**

Berbeda dengan PkM di masa lalu yang secara keseluruhan dilaksanakan secara seklusif, insidental, serta tak terpantau secara kolektif proses dan hasilnya, pada masa sekarang sesuai tuntutan *good governance* kegiatan PkM harus transparan, terintegrasi dan terukur proses dan hasilnya.

Sesuai amanat Pasal 55 dan Pasal 56 Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015, kegiatan PkM diarahkan untuk membawa hasil (*outcome*) berupa:

- a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas kademika yang relevan
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna
- c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
- e. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- f. Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna

Di samping itu, **luaran (*output*) kegiatan PkM harus dapat didiseminasikan**. Artinya, wujud luaran kegiatan PkM dapat diekspos luas untuk didiskusikan dan memberi inspirasi untuk tindak lanjut bagi (1) pengembangan program pendampingan masyarakat dan/atau bagi (2) pengembangan dharma pengajaran dan penelitian.

Luaran (*output*) kegiatan PkM dapat berupa:

- 1) naskah publikasi berisi paparan pelaksanaan kegiatan PkM
- 2) modul penerangan/penyuluhan/pendampingan/advokasi masyarakat/komunitas tentang suatu tema atau program pembangunan
- 3) buku teks untuk siswa/siswa tingkat SD—SMA, (4) film/video dokumenter
- 4) rangkaian karya fotografi tematik dengan teks anotasi
- 5) video dokumenter tentang substansi tema dan proses pelaksanaan kegiatan PkM
- 6) peta potensi suatu wilayah (potensi wisata, potensi budaya, potensi bencana dan lain-lain).



## 5. Mekanisme *Review* Proposal dan Ketentuan Pelaporan Kegiatan PkM

### 5.a *Proposal dan Mekanisme Review*

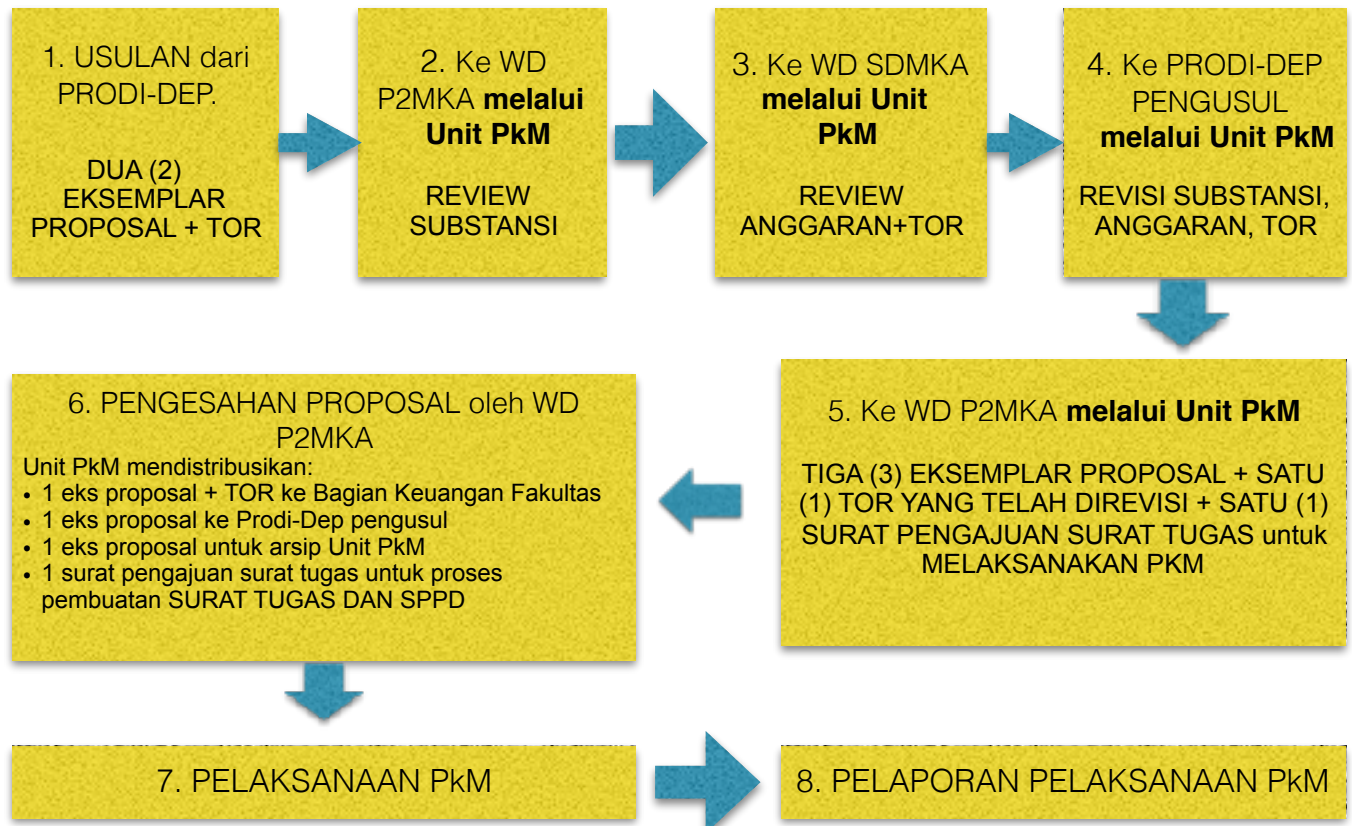
Proposal kegiatan PkM disusun dengan memuat beberapa komponen substansi yang kunci, yaitu

- latar belakang dan identifikasi permasalahan di masyarakat yang menunjukkan penting dan perlunya dilakukan kegiatan pengabdian,
- tujuan dan sasaran,
- metode dan tahapan pelaksanaan,
- wujud target output yang dapat didiseminasikan

Untuk menjamin tercapainya luaran dan mutu pelaksanaan PkM, proposal kegiatan PkM harus direview. Bentuk review proposal PkM dapat berupa seminar proposal PkM dan review oleh reviewer individual maupun gabungan keduanya.

Mekanisme pengajuan proposal PkM dan proses review atas substansi dan anggaran PkM diatur sebagai berikut (Gambar 1):

**Gambar 1: Alur Pengajuan Proposal dan Laporan PkM Skema Departemen dan Skema Fakultas di FIB UGM**





### **5.b Pelaporan Kegiatan PkM**

Laporan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- 1) Naskah Laporan Kegiatan PkM**, berisi komponen-komponen inti gagasan pengabdian masyarakat yaitu paparan (a) latar belakang dan identifikasi permasalahan di masyarakat yang menunjukkan penting dan perlunya dilakukan kegiatan pengabdian, (b) tujuan dan sasaran, (c) metode dan tahapan pelaksanaan, (d) pembahasan yang mengulas proses dan hasil kegiatan, dilampiri foto, peta, tabel, konstruksi modul dan lain-lain yang relevan, dan (e) kesimpulan yang menegaskan pokok-pokok “temuan” dan refleksi atas penyelesaian persoalan di masyarakat yang telah disasar oleh kegiatan pengabdian.
- 2) Output/luaran Kegiatan PkM yang dapat didiseminasikan**, yaitu produk luaran kegiatan PkM yang telah dijanjikan pada proposal, dapat berupa video dokumenter pelaksanaan kegiatan PkM, seri foto digital dengan anotasi, modul pembelajaran masyarakat, brosur layanan masyarakat, peta daerah sasaran PkM dengan potensi tertentu (potensi wisata, potensi budaya dan lain-lain).
- 3) Laporan Keuangan**, yaitu rincian pemakaian dana pengabdian masyarakat sesuai ketentuan berlaku. Laporan pertanggungjawaban keuangan dilampirkan bersama Daftar/ Rekap Transaksi Keuangan yang telah digunakan untuk kegiatan PkM dan bukti transaksi (kuitansi) setiap pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan keuangan yang berlaku.

Format Laporan Kegiatan PkM terlampir pada Lampiran 1.

## **6. Penutup**

Pedoman Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan PkM merupakan patokan umum. Program secara rinci dan jadwal kegiatan PkM setiap tahun disesuaikan dengan batasan waktu dan kondisi setiap prodi, departemen dan fakultas pada tahun yang terkait. Pemikiran-pemikiran lain terkait kegiatan PkM dapat dikembangkan secara mandiri oleh Departemen, tetapi tetap di dalam payung pemikiran Pedoman ini.

Secara khusus harus ditulis bahwa Pedoman ini tidak/belum menyinggung Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk PkM yang baku yang selama ini telah rutin berjalan. Pengelolaan dan pelaksanaan KKN merupakan bagian dari kerja bidang akademik. Untuk itu dibutuhkan panduan terpisah tentang KKN sebagai bentuk PkM, panduan mana harus dihasilkan dari sinergi antara Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FIB, dan Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada.



**Lampiran 1: Format halaman sampul Laporan Pengabdian kepada Masyarakat**

# LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA DEPARTEMEN/FAKULTAS

(logo UGM)

## Daftar Isi

### Halaman Pengesahan

1. **Naskah Laporan Kegiatan PkM:** “(...*judul substansi laporan...*”, lihat penjelasan struktur dan isi terlampir)
2. **Output Kegiatan PkM:** “(...*judul output kegiatan PkM...*)”
3. **Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

### Lampiran-lampiran:

- terkait substansi PkM (foto, peta, tabulasi data, daftar informan, modul dan lain-lain)
- terkait LPJ Keuangan (Daftar/Rekap Transaksi Keuangan yang telah digunakan untuk penelitian sesuai ketentuan)

Ketua Tim PkM: .....

Anggota Tim PkM: -----, -----, -----, dst

Program Studi ..... Departemen .....

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tahun Anggaran: .....

Kontrak PkM Nomor: .....



### **Penjelasan**

**Naskah Laporan Kegiatan PkM**, dengan struktur dan isi sebagai berikut:

**1) Pendahuluan**

Berisi latar belakang pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), masalah atau persoalan dalam masyarakat yang akan dipecahkan melalui kegiatan PkM yang akan dilakukan, dan tujuan serta sasaran pelaksanaan kegiatan PkM.

**2) Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Uraian tentang cara pelaksanaan PkM dalam kaitannya dengan pemecahan masalah yang diajukan, misalnya antara lain dengan cara mediasi, pelatihan, pendampingan, atau konsultasi.

**3) Pembahasan**

Menjabarkan proses pelaksanaan kegiatan PkM dan capaian hasil kegiatan. Demikian pula bagian ini akan membahas secara rinci seberapa jauh keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik secara metodologis maupun kemanfaatan kegiatan PkM.

**4) Penutup**

Kesimpulan terhadap pelaksanaan kegiatan PkM, antara lain: tingkat ketercapaian kegiatan PkM, dampak dan manfaat kegiatan PkM yang sudah terlihat, dan rekomendasi yang dapat diberikan bagi kegiatan serupa atau lanjutan di masa depan.